

# TERORISME, PURITANISME DAN NEGARA

Soffa Ihsan

STAINU Jakarta

soffametal@yahoo.com

## Abstract

This article attempts to give a literature description of the puritan movement and terrorism and how the state plays its role to cope with these issues. Puritanism is characterized by a closed, absolutist, and literal attitude. Islam is kept out of the context of its historical aspects. The most prominent feature is a militant attitude of its followers by practicing the Islamic teachings offensively in which these often result in violent actions. A number of models of Islamic groups like *Salafi-Wahabi*, for an instance, is spreading its *dakwah* vigorously and making a frequent friction among Muslim society in Indonesia. This fact goes along with terrorism. Some radical-terrorist cells continue to develop their power, while at the same time they spread such labels as *thaghut*, *kafir* and *syirik* against other people. In this stage, the community along with the state deal with face to face against radical ideology. Democracy is facing a dilemma in dealing with the radical movements. The writer argues, therefore, that there is a critical need to strengthen a moderate understanding and state's firmness to regulate any religious ideology.

**Keywords:** Puritanism, truth claim, role of the state

## Abstrak

Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi literatur tentang gerakan puritan dan terorisme serta bagaimana peran negara mengatasi hal ini. Puritanisme dicirikan sebagai sikap yang tertutup, absolutis, dan literal. Islam dijauhkan dari konteks sejarah. Ciri yang menonjol adalah sikap yang militan pengikutnya, mempraktikkan ajaran secara ofensif, dan terkadang berbuntut kekerasan. Kelompok-kelompok Islam model Salafi-Wahabi tengah memainkan dakwahnya secara gencar dan sering terjadi gesekan di masyarakat. Fakta ini beriringan dengan terorisme. Beberapa sel radikal teroris masih terus menyusun kekuatan, sembari menyebarkan pelabelan thagut, kafir, dan syirik. Di sini, masyarakat dan negara berhadapan. Demokrasi mengalami dilema dalam menghadapi gerakan radikal. Hal yang diperlukan adalah penguatan pemahaman moderat dan ketegasan negara mengatur paham keagamaan.

**Kata Kunci:** Puritan, klaim kebenaran, peran negara

## Pendahuluan

Terorisme adalah hal yang sering menjadi perbincangan. Tentu wajar bila masyarakat atau pihak terkait tak jemu-jemu membicarakan soal terorisme. Hal ini lantaran ancaman teroris di negeri kita masih berpoetensi besar. Serangkaian tindakan teroris yang terjadi selama ini menunjukkan model terorisme di negeri kita bermuarakan pada paham keagamaan (*religious terrorism*). Terorisme jenis ini tak mengenal batas-batas wilayah. Dengan militansi yang sangat tinggi, dan keyakinan keagamaan akan kebenaran aksinya, mereka tak ambil peduli dengan segala bentuk hadangan ataupun perlawanan dari aparat. Ya, berbagai penelitian mewedarkan bahwa terorisme masih bercokol dan terus memasang ‘jurus-jurus baru’ yang setiap saat atau momen tertentu akan beraksi. Sel-sel teroris terus bertumbuh. Kini bukan lagi terorisme semata dalam bentuk ‘jaringan’, tetapi berpindak model baru, seperti *lone wolf* dan *self terrorism*.

Fakta lain, kita perlu terus melakukan pengkajian, pengamatan dan kewaspadaan terhadap ‘semangat’ yang kian membara, yaitu tumbuh mekarnya puritanisme di kalangan sebagian umat Islam. Barangkali secara kuantitas tampak kecil, tetapi ibarat ‘kanker’, puritanisme akan bisa berkembang menjadi ‘kekuatan’ yang tak mustahil mampu menjelma menjadi terorisme. Kerap kali didengungkan bahwa puritanisme bisa menjadi ‘benih’ dari terorisme. Tesis ini sudah banyak yang membenarkan.

Saat ini, negeri kita tengah ‘panen’ kelompok-kelompok puritan. Beberapa kejadian yang bisa memotret tentang ‘kekalapan’ puritanisme dapat dibeberkan. Pernah terjadi pembubaran oleh segelintir orang terhadap sebuah komunitas yang sedang merayakan Maulid Nabi di sebuah desa di Yogyakarta. Di daerah lain seperti Cirebon juga pernah terjadi pelemparan bom molotov oleh sekelompok orang terhadap jamaah mushola yang tengah merayakan Maulid Nabi yang diramaikan dengan iringan Marawis. Isu *bid’ah* yang ditudingkan pada perayaan

Maulid Nabi walaupun itu sudah isu lama dan basi—sekarang berkobar kembali seiring dengan berkecambahnya kelompok-kelompok Islam puritan. Di Yogyakarta juga pernah ada segerombolan orang berpenampilan ‘cingkrang’ mengacak-acak makam Kyai Ageng Prawiro Poerbo, mereka menuliskan di batu nisan dan lantai kata-kata “syirik haram”. Para perusak makam itu juga sempat mengatakan pada penjaga makam bahwa tempat tersebut merupakan tempat praktik syirik, haram.

Berkali-kali juga ada kasus ‘pecah kongsi’ satu keluarga akibat ada salah satu anggota keluarga yang masuk dalam kelompok Islam puritan. Kita bisa ambil contoh, Muhammad Syarif, pengebom bunuh diri di Mapolsek Cirebon, setelah kerasukan faham puritan yang radikal, lantas menghujat orang tuanya karena berbeda dalam soal pemikiran dan amaliah ibadahnya. Syarif juga menuding-nuding Indonesia sebagai negara *thoghut* karena tidak menerapkan syariat Islam. Masyarakat di beberapa daerah pun sempat dibuat gegaranlantaran membunyah tuduhan *syirik*, *bid’ah* bahkan kafir oleh sekelompok jamaah puritan.

Bangkitnya puritanisme Islam ini memang bukan khas di Indonesia. Pasalnya, gerakannya bersifat transnasional. Di Mesir pernah terjadi aksi kelompok Salafi yang melakukan pembubaran perayaan Maulid Nabi yang tengah dihelat oleh komunitas muslim di sebuah daerah di Mesir. Bahkan pembubaran itu disertai aksi pembantaian yang menimbulkan banyak korban tewas. Mereka juga bersiap untuk menghancurkan makam-makam auliya Mesir yang menjadi tempat ziarah serta situs-situs sejarah lainnya. Mesir mengalami nasib yang jauh lebih parah dibanding negeri kita dalam serbuan kelompok Islam puritan dan kelompok *takfiri*. Dan ini terjadi sudah sekian lama di Mesir. Kita mengenal tokoh ulama *frontliner* garis keras Mesir, yaitu Sayyid Quthub dengan semboyan ‘tauhid hakimiyah’-nya yang banyak menginspirasi

bangkitnya kelompok puritan-radikal yang kerap melayangkan teror.

Beberapa negeri muslim terlihat juga sama-sama mengalami gempuran Islam puritan dengan insiden yang tak kalah tragis. Kelompok militan di Somalia, yaitu Asyasyabab, melakukan aksi vandalis dengan menghancurkan makam ulama yang banyak diziarahi oleh masyarakat setempat setelah berhasil menguasai satu daerah. Bahkan pula, pernah terjadi aksi brutal pemboman saat ada perayaan haul seorang ulama terkemuka di suatu daerah di Somalia. Boko Haram di Nigeria tak kalah ganas dalam beraksi menggempur apa yang mereka anggap *bid'ah* dan syirik.

Puritanisme terus beralih rupa bahkan lebih garang dalam wujud gerakan politik berbendera penegakan khilafah seperti dikobarkan oleh ISIS. Bukan hanya membantai mereka yang berbeda faham baik terhadap Syiah maupun Sunni, ISIS juga melakukan penghancuran terhadap situs-situs kuno dan makam-makam ulama karena dianggap sebagai lahan kesyirikan. Bahkan ISIS juga mengancam akan menghancurkan Ka'bah di Mekkah. Penghancuran makam sahabat nabi di Syria dan barusan juga makam Imam Nawawi penyusun kitab *Riyadhushshalihin* adalah contoh aksi vandalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teror berbasis faham puritanisme.

Di Yaman seperti pernah diceritakan oleh Dr Said Ramadhon al-Buthi, pernah terjadi peristiwa saling bunuh dalam satu keluarga akibat infiltrasi pengaruh Islam puritan. Arab Saudi sendiri juga pernah menerima nasib dikafirkan. Osama bin Laden menyebut pemerintah Arab Saudi telah melakukan kekafiran akbar, karena menihilkan hukum syariat serta menyerahkan negara untuk dijajah Amerika. Pandangan Osama inilah yang dianut oleh Imam Samudra, Amrozi dan Mukhlas. Merunut peristiwa sebelumnya, di tahun 1979, terjadi kasus gempar, yaitu pendudukan Masjidil Haram di Mekkah pada musim haji oleh seorang puritan-radikal

bernama Juhaiman al-Utaibi. Pemahamannya tentang pemurnian Islam yang kebablasan mendorong Juhaiman beserta pengikutnya melakukan tindakan kalap dengan akibat banyak nyawa merengang termasuk tewasnya jamaah haji Indonesia kala itu.

Di negeri kita yang memiliki multi tradisi, budaya dan kearifan lokal serta bersemayamnya banyak warisan sejarah termasuk makam-makam raja dan ulama berikut tradisi ziarah yang begitu menyejarah dikalangan umat Islam Indonesia, dirasakan tinggal 'tunggu waktu' menjasadnya vandalisme atas nama puritanisme. Beberapa kejadian seakan sudah bisa menjadi 'indikator' (*qarinah*) adanya aksi vandalisme tersebut. Mungkin ini pandangan berlebihan, tetapi tidak mustahil terjadi mengingat saat ini negeri kita sedang berkecambah kelompok puritan yang makin gahar dan bermilitansi tinggi. Mereka memang masih banyak yang menyembunyikan identitasnya (*taqiyah*), dan banyak yang belum memasuki ranah politik. Kebebasan berserikat dan ekspresi di era reformasi ini, kian menyuburkan faham-faham puritan dan radikal, terlebih akses informasi global yang sangat memudahkan masuknya faham-faham transnasional.

Boleh jadi benar apa yang dinyatakan oleh Zachary Abuza bahwa pada pengalamannya berdemokrasi, Indonesia digolongkan sebagai negara lemah secara politik, dan kekuatan Islam radikal tumbuh dengan kekuatan yang semakin besar dan mereka mampu mengontrol pemerintah pusat dan dinamika hukum (Zacharia Abuza, 2003: 190).

### **Klaim Otentisitas**

Arus reformasi dan demokratisasi saat ini telah mengilhami kebebasan untuk mendiskusikan wacana keagamaan yang selama ini mengalami keterkungkungan. Hal ini bukan hanya dalam hal penerapan yang bersifat teknis, akan tetapi dalam mengungkap dimensi yang hilang dalam wacana syariat Islam. Di sini pula, terdapat ruang yang lebar untuk memahami

kembali syariat Islam yang selama ini hanya identik dengan istilah “penerapan dan formalisasi” (*tathbiq*).

Saat modernisasi begitu pesatnya merasuki seluruh relung kehidupan masyarakat, pada saat itulah muncul sekelompok orang yang berusaha mencari “identitas” keagamaannya. Perjuangan merebut identitas lalu dianggap sebuah kewajiban. Namun dalam pencarian identitas keagamaan tersebut--mengutip Abid al-Jabiri--ada perbedaan mencolok antara gerakan di masa lalu dan di masa kontemporer. Gerakan puritan-ekstremis masa lampau melawan modernisme pada tataran akidah, sedang masa kontemporer pada tataran syariah. Pada tahap ini, primordialisme pun kian menguat. Namun, rasa kebersamaan yang mencerminkan kebersamaan dan solidaritas sebagai pemeluk faham keagamaan pada akhirnya bergeser ke dalam bentuk puritanisme dan militanisme saat berhadapan dengan kelompok lain. Al-Jabiri mengkritik gerakan salaf, karena kehilangan objektivitas dan historisitas (*la tarikhiyyah wa llamawdu'iyah*) dalam membaca *turats*. Mereka terlalu mengagungkan pencapaian masa silam sehingga cenderung mengabaikan realitas sosial masyarakat, seolah-olah tidak berpijak pada bumi nyata (Muhammad 'Abid al-Jabiri, 1993; 13).

Implikasinya, kita secara tidak sadar menjumpai gugatan demi gugatan tentang wacana mengembalikan otentisitas (*ashlah*) Islam yang semakin gencar. Mereka menganggap, otentisitas Islam hilang manakala dicampuri oleh unsur dari luar seperti tradisi lokal. Gugatan ini telah masuk pada level praksis. Meminjam kalimat Hasan Hanafi, umat Islam umumnya lebih merasa *at home* dengan tradisi ketimbang modernitas, karena tradisi telah menyatu dalam kesadaran sejak empat belas abad lalu, sementara modernitas baru datang tidak lebih dari dua ratus tahun lalu (Hasan Hanafi, 1991: 15).

Pertanyaannya kini, apakah yang dimaksud dengan Islam otentik? Apakah yang dimaksud otentik harus kearab-araban?. Apakah Islam otentik mesti "galak" terhadap semua yang

bukan dari Islam, tradisi lokal dan modernitas? Dalam lanskap keindonesiaan, sejak dibukanya kran demokrasi pada tahun 1998 sebagai awal era reformasi, beragam ekspresi keyakinan keagamaan, politik dan budaya muncul ke permukaan. Sebagai sebuah konsekuensi logis dari iklim demokrasi, hal tersebut terasa membanggakan karena partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda demokrasi begitu intens. Di sisi lain, ketika kran demokrasi dan keterbukaan dimanfaatkan untuk tumbuh dan berkembangnya organisasi politik, sosial atau keagamaan untuk tujuan-tujuan yang esensinya menyerang nilai-nilai demokrasi dan jatidiri bangsa yang berbhinneka tunggal ika yang tentunya ini menjadi memprihatinkan.

Diantara paham keagamaan yang muncul secara “heroik” pada era reformasi adalah kelompok “Islam garis keras”, “Fundamentalisme Islam” atau “Islam Puritan”. Walaupun kemunculan mereka memanfaatkan kran demokrasi, akan tetapi spirit gerakan mereka pada dasarnya kontradiktif dengan sistem demokrasi dan spirit pluralisme. Syafi’i Ma’arif dalam hal ini mengatakan bahwa semua kelompok Islam puritan adalah anti demokrasi, akan tetapi mereka memakai lembaga negara untuk menyalurkan cita-cita politiknya. Dalam ungkapan lain, ada ketidakjujuran dalam berpolitik, secara teori, demokrasi diharamkan, tetapi secara praktek digunakan untuk mencapai tujuan (Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam Abdurrahman Wahid (ed), 2009: 9).

Gerakan puritanisme Islam di Indonesia bermetamorfosa dalam beberapa bentuk seperti ada yang secara jelas menunjukkan sikap radikalnya dengan melakukan terorisme dan ini sering disebut Salafi-Jihadis. Ada yang berbentuk organisasi yang sangat kritis terhadap pemerintah dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan terorisme. Ada pula, yang lebih menfokuskan pada pemberantasan segala amalan ritual yang bersinkretis dengan budaya lokal. Bentuk yang seperti ini ada yang berwujud organisasi dan ada juga yang hanya berbentuk jamaah-jamaah yang berpusat di masjid. Dari semua

bentuk gerakan puritanisme Islam ini memiliki kesamaan maupun perbedaan. Kesamaannya ada pada upaya “pemurnian” terhadap amalan ritual dari lokalitas budaya dengan menjauhi apa yang disebut *bid'ah*, syirik dan khurafat. Sedangkan perbedaannya ada pada “sub ideologi” tentang langkah dan tindakan dalam melakukan aksinya.

Dalam kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia, sistem demokrasi dengan spirit pluralismenya dinilai sebagai sistem politik dan pemerintahan yang paling elegan dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Ideologi-ideologi politik yang bersifat totaliter—baik itu yang sekuler maupun yang religious—terbukti telah mendiskreditkan sisi-sisi kemanusiaan manusia. Ada dua unsur khas yang dikandung ideologi totaliter; *pertama*, ketaatan tanpa *reserve* dan *kedua*, mesin psikologi ideologi, yakni yang mendorong pengikut ideologi tersebut adalah kebencian sebagaimana tercermin dalam ideologi komunisme dan nazisme dan ideologi agamis yang mewujud dalam puritanisme (Franz Magnis Suseno, 2008: 24).

Konsep “puritan” dalam kamus Abou El-Fadl merupakan lawan konsep “modern”.<sup>1</sup> Kelompok puritan adalah mereka

---

<sup>1</sup> Pemakaian istilah ini untuk melabeli kaum yang radikal dan ekstrim berbaju agama, menurutnya lebih tepat daripada istilah fundamentalis, militan, ekstrimis, radikal, fanatik, jahidis ataupun islamis. Istilah “fundamentalis” menimbulkan kerancuan karena semua kelompok dalam Islam tentu mengklaim dirinya melaksanakan ajaran-ajaran fundamental Islam. Terma “militan” juga tidak selalu benar, karena bersikap militan dalam kondisi tertentu diperbolehkan, bahkan oleh agama apapun. Istilah “ekstrimis”, “radikal” dan “fanatik” juga tidak bisa menggambarkan kelompok yang dikupas Abou El-Fadl dalam buku-bukunya. Karena mereka ternyata tidak selalu ekstrim, radikal dan fanatik dalam segala hal, akan tetapi mereka selalu absolutis yakni menuntut kepastian dalam menafsir teks. Penggunaan istilah “jahidis” juga merancukan pemahaman keunikan dan partikularitas orientasi kaum puritan. Istilah “islamistis” mengacu pada kelompok yang berorientasi pada Islam politik yang dicitrakan Barat sebagai berbahaya bagi kelangsungan masyarakat yang beradab dan demokratis. Secara umum “islamistis” memang adalah kaum muslimin yang meyakini bahwa teologi dan hukum Islam seharusnya menjadi kerangka acuan otoritatif dalam setiap kondisi sosial dan politik. Akan tetapi, tidak berarti mereka selalu berkeyakinan akan adanya keharusan negara teokrasi yang memaksakan keberlakuan hukum Islam secara keras dan literal. Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi, 2006), 29 –32.

yang secara konsisten dan sistematis menganut absolutisme, berpikir dikotomis, dan idealistik. Mereka tidak kenal kompromi, cenderung puris dalam artian tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang dan berkeyakinan bahwa realitas pluralistik merupakan kontaminasi terhadap autentisitas Gerakan puritan umumnya menganggap dirinya lebih benar dari pada lawannya. Menurut Abou El-Fadl, puritanisme selalu berwatak intoleran, merasa superior, pengungkungan terhadap perempuan, antirasionalisme, membenci bentuk-bentuk kreatif ekspresi artistik dan sangat literalis (Khalid Abou El-Fadhl, 2006: 29).

Menyitir mufti Mesir, Dr Ali Jum'ah, kaum puritan berpegang pada sejumlah masalah yang sebenarnya tidak mewakili karakter umat, tetapi sekedar masalah cabang (*furu'yyah*), dan lalu mereka jadikan sebagai tolok ukur untuk mengelompokkan umat Islam (Dr Ali Jum'ah, 2012: 21).

Geneologi puritan dalam Islam, menyitir Hasan Hanafi, berasal dari *istilahas-salafiyyah* dengan asumsi bahwasalah, yaitu generasi pendahulu, lebih utamadari padakhalaf (generasi kontemporer-belakangan), dengan mengacu pada teks al-Quran "*Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya*" (Q.S. Maryam [19]:59). Generasi salaf lebih suci daripada generasi khalaf. Pemahaman seperti ini juga umum ditemukan dalam aforisma Arab "yang baik adalah orang dahulu dan yang jelek adalah orang sekarang". Bahkan persepsi ini sudah mendarah daging di alam intuisi masyarakat yang berkaitan dengan moyang dan generasi-generasi pendahulu, begitu juga termanifestasi dalam sikap kecintaan pada sesuatu yang berbau kuno dan antik, *al-jubn al-qadim*, penyesalan atas hari-hari yang telah berlalu, bahkan menangi waktu yang telah hilang (Hasan Hanafi, 2003: 108).

Sikap-sikap seperti ini merupakan anasir-anasir yang membentuk kebudayaan masyarakat klasik. Kelompok puritan ingin merevitalisasikan Islam dengan kembali pada pengamalan

Islam seperti kelompok salaf terdahulu. Saat ini terlihat gerakan puritanisme Islam merupakan organisasi terstruktur, sistematis dan profesional, serta giat menyebarkan dakwah pemurniannya.

Islam Transnasional merupakan nama lain dari Islam radikal, Islam kanan, fundamentalisme Islam dan Islam puritan. Kelompok-kelompok puritan mempunyai variasi nama dan gerakan, akan tetapi karakter keberagamaan mereka mempunyai benang merah yang sama. Kelompok puritan di Dunia Islam bisa disebut misalnya Ikhwan al-Muslimin, Jama'at Islami di Pakistan, Hizbullah di Lebanon, al-Jama'ah al-Islamiyyah di Mesir, Hamas di Palestina, FIS di al-Jazair, Partai Refah di Turki, Tanzim al-Qaida, Jabhah Al-Nusra dan ISIS.

Gerakan Islam Transnasional yang beroperasi di Indonesia cukup beragam. Misalnya Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir. Gerakan ini hadir pada awalnya melalui aktivitas-aktivitas dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan tarbiyah. Wahabi/Salafi dengan programnya "Wahabisasi Global" (Abdurrahman Wahid (ed), 2009:78). Selain itu, bisa disebut Majelis Mijahidin Indonesia (MMI), Jamaah Salafi, Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI), Dar al-Islam (DI) (Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, 2005: 11).

Di Indonesia terdapat pula fakta kepulangan para veteran perang Afghanistan pasca kejatuhan Uni Soviet memberi warna baru. Persentuhan langsung dengan para pejuang dari negara lain selama perang pembebasan Afghanistan makin memperteguh Wahabisme mereka. Pengalaman tempur di medan perang menambah keyakinan bahwa otot dan senjata menjadi identitas baru. Sebuah identitas kekerasan.

Diantara kelompok-kelompok radikal di atas, kelompok Wahabi dinilai cukup berpengaruh karena dukungan petrodolarnya dan bahkan bisa dikatakan bahwa secara geneologis kelompok-kelompok Puritan Islam bisa dirujuk pada aliran

Wahabi. Kelompok Wahabi dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di semenanjung Arabia pada abad ke-18. Pendiri kelompok Wahabi ini berkeyakinan bahwa solusi bagi kemunduran umat Islam adalah dengan pemahaman dan penerapan literal teks sebagai satu-satunya sumber otoritas yang absah (Khalid Abou El-Fadhl, 2003: 4). Karenanya, setiap usaha menafsirkan teks secara historis dan sosiologis bahkan filosofis dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Tidak ada multi-tafsir dalam agama, tidak ada pluralisme, dan autentik berarti melaksanakan bunyi teks secara literal. Untuk menarik simpati masyarakat muslim, kelompok Wahabi banyak menggunakan simbol-simbol salafi. Kelompok inipun lebih menyukai untuk disebut sebagai kelompok “Salafi” dengan jargon kembali kepada “*al-salaf al-shalih*”, kembali kepada Islam otentik versi mereka.

Mereka mengagungkan teks secara berlebihan dengan mengabaikan konteks Mereka mudah membid’ahkan dan mensesatkan segala bentuk perbedaan. Gampang menyerbu bukan kelompok sepaham, tanpa toleransi. Gampang mencibir kalangan Islam yang bukan pengikut mati generasi *salaf al-shalih*. Kata-kata “bid’ah”, “kafir”, “musuh Islam”, “penghancur Islam dari dalam”, dan seterusnya, mudah menjadi ungkapan harian.

Demikianlah, kelompok puritan mengklaim sebagai pewaris tunggal kebenaran dan karenanya muslim yang berbeda dianggap kurang islami atau bahkan kafir. Karena itulah, selain karena ambisi politik, kelompok puritan terus melakukan infiltrasi ke dalam masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta dan ormas-ormas Islam moderat.

### **Peran Negara**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa ini. Umat Islam, walau dalam jumlah mayoritas, pada era awal berdirinya

negara ini berbesar hati memilih negara demokrasi dan menghindari negara teokrasi karena kesadaran kemajemukan.

Kini, di tengah hingar bingarnya iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi dan hadirnya semangat dan gerakan keagamaan yang bersifat puritan, cita pendiri bangsa ini dan fakta kemajemukan bangsa terabaikan. Tensi hubungan antar kelompok keagamaan dalam internal agama Islam, juga dengan agama lain seringkali memanas dan bahkan berakhir dengan kekerasan. Muncul klaim-klaim kebenaran dan penyesatan antara satu kelompok dengan yang lain.

Bagaimana peran negara? Mengutip Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah (Miriam Budiardjo, 2008: 49).

Menurut Miriam Budiardjo, negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada organisasi atau asosiasi lainnya. Setiap negara mempunyai sifat memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semua; (1). Sifat memaksa perlu ada agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan sebagainya. (2). Sifat monopoli berarti negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. (3). Sifat mencakup semua berarti semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa kecuali (Miriam Budiardjo, 2008: 49-50). Jelasnya, bagi Miriam Budiardjo, pemerintah merupakan organisasi yang berwewenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Berbagai macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-

tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.

Dalam pandangan Fukuyama, dalam suatu negara perlu menyediakan derajat hierarki, yakni menyediakan keteraturan publik dan pertahanan dari serangan luar sebelum menyediakan asuransi kesehatan umum atau pendidikan gratis (Fukuyama, 2005: 7-8). Fukuyama mengkategorikan keteraturan dan pertahanan sebagai fungsi minimal negara, sedangkan asuransi dan pendidikan sebagai fungsi menengah. Fukuyama memandang perlu adanya kekuatan yang mampu merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang; menjalankan administrasi secara efisien dan dengan birokrasi minimal; mengontrol penyogokan, korupsi, dan penyuapan; memelihara tingkat transparansi dan pertanggungjawaban yang tinggi di lembaga-lembaga pemerintah dan yang sangat penting menegakkan undang-undang. (Fukuyama, 2005: 10-11). Fukuyama mengajukan tesis memperkuat negara melalui berbagai bentuk pembangunan bangsa khususnya dalam konteks keamanan. Dengan kekuatan yang sah, negara dapat memberlakukan supremasi hukum di dalam negeri, dan untuk menjaga ketertiban dunia di tingkat internasional secara kuat dan efektif. (Fukuyama, 2005: 156-157).

Dalam fikih,—mencuplik pandangan Imam Rafi'i—sebagaimana dikutip dalam kitab *Panah al-Thalibin* karya Zainuddin al-Malaibari bahwa semua keputusan dan kebijakan penguasa merupakan pendapat yang “lebih baik dan relevan” dari pada meniadakan fungsi negara. Resikonya, atas nama apapun, jika gerakan tertentu mengarah pada penentangan atas perintah dan kebijakan pemerintah, maka tidak diperbolehkan (Zainuddin al-Malaibari, tt; 27)

Nah, disinilah perlunya peran negara untuk lebih memperkuat posisi dan tugasnya. Kewajiban negara adalah untuk melakukan kebijakan yang tegas demi melindungi masyarakat dari disharmoni sosial. Tentu juga sangat

diharapkan bagaimana negara memberikan solusi tuntas dan integral terhadap permasalahan bagaikan ‘tumpukan jerami’ ini yang setiap saat mudah terbakar.

### **Penutup**

Salah satu tantangan terbesar bangsa ini adalah menyadari betapa pentingnya mereaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan ditengah gempuran puritanisme dan radikalisme. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sudah seharusnya bangsa ini memperkuat kembali dalam ketegasan mengatur’ lalu lintas faham keagamaan’ yang kerap justru menimbulkan kegaduhan.

Menyikapi maraknya gerakan puritanisme Islam ini, ada hal yang sangat mengusik nurani dan solidaritas kebangsaan kita ketika ‘negara gagal’ melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dalam kasus ini semakin banyak warga masyarakat menjadi korban gerakan ‘kalap’ faham keagamaan tersebut, ini membuktikan ketidakberdayaan sistem pertahanan kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan lebih mengerikan lagi adalah ketika semua elemen bangsa “membiarkan” tidak berbuat apa-apa dan “menyerah” terhadap sepak terjang gerakan puritanisme yang kehadirannya kerap kali menimbulkan gesekan dan bahkan konflik di masyarakat baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Kerawanan konflik inter dan antar umat beragama, setidaknya disebabkan oleh tiga hal, *pertama*, masalah paradigma dan interpretasi keagamaan. *Kedua*, masalah implementasi pemahaman keagamaan dalam kehidupan sosial. *Ketiga*, masuknya dimensi-dimensi kepentingan politis dalam interpretasi dan implementasi keagamaan.

Masalah paradigma beragama dan interpretasi keagamaan kerap kali menjadi pemicu terjadinya perbedaan yang mengarah kepada konflik inter dan antar umat beragama. Fatwa-fatwa keagamaan yang muncul pun bisa mensiyar sebagai “idiologisasi” yang bersifat aksiomatik-positivistik-monistik, yaitu sebagai satu-satunya kebenaran final dan tahan gugat.

Dalam hal ‘penertiban internal’ pemahaman keagamaan terkait puritanisme keagamaan dan politik kepentingan yang bersifat partisan, sudah selayaknya gigih merawat tradisi intelektual klasik atau dalam istilah Abou El-Fadl *harkening back to tradition*. Diantara karakter intelektual klasik adalah subur-nya dinamika wacana keagamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Kemudian, mengembangkan teologi yang bersifat inklusif, yakni teologi yang lebih responsif terhadap problematika kontemporer dan lebih berorientasi pada persaudaraan, harmoni, dan perdamaian antar sesama. Dan juga, mengembangkan pola pendekatan studi agama yang kritis yang bisa memilah dengan cerdas mana dimensi keagamaan yang bersifat absolut dan mana yang relatif serta meminimalisasikan pendekatan yang bersifat normatif-dogmatis.

Tak ayal, bila semua pihak membiarkan gerakan puritan-radikal ini menebar gerakannya yang tersebar tanpa batas, tanpa kesulitan dan halangan, bahkan larangan, maka pantas dikatakan kita sedang melakukan gerakan bunuh diri dan mengubur hidup-hidup NKRI serta membunuh hanguskan Pancasila sebagai Rumah Kita.

### Daftar Rujukan

- Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. The Wahid Institute, Jakarta, 2009
- Ali Jum’ah, *Bukan Bid’ah*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2012
- Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, 2005
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008
- Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Gramedia. Jakarta, 2005
- Hasan Hanafi, *Aku Bagian Dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran Asad Irsyady dan \_\_\_\_\_, *Muqaddimah fi ‘Ilm al-Istighrab*. Cairo, 1991
- Khalid Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, Serambi, Jakarta, 2006

- \_\_\_\_\_ *Cita dan Fakta Toleransi Islam*, terj. Heru Prasetya, Mizan, Bandung, 2003
- Muhammad, Abid al-Jabiri, *Nahmu wa al-Turats Qiraat Mu'asirah fi Turatsina Falsafi*, al-Markaz al-Tsaqafiy al-Arabiy, Beirut, 1993
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Zachary Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia, Crucible of Terror*, Lynne Rienner Publisher, Boulder London, 2003
- Zainuddin al-Malaibari, *I'annah al-Tholibin*, Toha Putra, Semarang, tt